

Pola Kemitraan PT. Ciptatani Kumai Sejahtera (Medco Agro) dengan Masyarakat dalam Program Replanting Desa Sukamakmur Kecamatan Seruyan Tengah Kalimantan Tengah

Frengky Irawan^{*)}, Dimas Deworo Puruhito, Sofia Rahmawati

Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, INSTIPER Yogyakarta

^{*)}Email Korespondensi: frengkyirawan007@gmail.com

ABSTRAK

Program *replanting* kelapa sawit merupakan langkah strategis untuk mempertahankan produktivitas kebun plasma yang telah melewati umur produktif, tetapi pelaksanaannya membutuhkan biaya besar sehingga sangat bergantung pada pola kemitraan antara perusahaan dan petani. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pola kemitraan PT. Ciptatani Kumai Sejahtera (Medco Agro) dengan masyarakat dalam program *replanting* di Desa Sukamakmur, Kecamatan Seruyan Tengah, Kalimantan Tengah, mencakup tahapan pelaksanaan, pemenuhan hak dan kewajiban, serta kendala yang dihadapi. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan data primer dari observasi, wawancara mendalam terhadap 30 petani plasma serta pihak manajemen perusahaan dan koperasi, dan dokumentasi, yang dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemitraan berjalan melalui alur perusahaan-koperasi-petani-pelaksanaan replanting-monitoring-evaluasi, dengan capaian kumulatif seluas 210 hektare pada periode 2021-2025. Pemenuhan hak dan kewajiban tergolong tinggi pada aspek penyediaan bibit (96,00%) dan monitoring (91,33%), tetapi masih rendah pada pelaporan perkembangan (69,33%) dan transparansi informasi (66,67%). Kendala utama yang dihadapi adalah pendanaan (56,67%) dan administrasi (43,33%), yang diatasi melalui koordinasi perusahaan, koperasi, dan petani. Secara umum, 76,67% petani menilai kemitraan berjalan baik hingga sangat baik, menunjukkan bahwa prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan telah terwujud, meskipun keterbukaan informasi dan pelaporan berkala masih perlu diperkuat untuk mendukung keberlanjutan kemitraan jangka panjang.

Kata Kunci: kemitraan; program replanting; kelapa sawit; hak dan kewajiban; petani plasma

PENDAHULUAN

Kelapa sawit merupakan komoditas perkebunan strategis yang berkontribusi besar terhadap devisa negara, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan pendapatan masyarakat pedesaan. Seiring bertambahnya umur tanaman, produktivitas kelapa sawit mengalami penurunan setelah melewati usia sekitar 25 tahun, sehingga peremajaan atau *replanting* menjadi kebutuhan mutlak untuk mempertahankan keberlanjutan usaha perkebunan (Ridha et al., 2022). Pelaksanaan *replanting* membutuhkan biaya yang besar, diperkirakan mencapai sekitar Rp80.000.000 per hektare, sehingga keberhasilannya sangat bergantung pada dukungan berbagai pihak, terutama pola kemitraan antara perusahaan inti dan petani plasma yang umumnya memiliki keterbatasan modal.

PT. Ciptatani Kumai Sejahtera, salah satu unit usaha Medco Agro yang berlokasi di Desa Sukamakmur, Kecamatan Seruyan Tengah, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah,

mengelola areal seluas kurang lebih 12.093 hektare yang terdiri atas 7.093 hektare kebun inti dan 5.000 hektare kebun plasma. Kebun plasma dikelola bersama masyarakat yang tergabung dalam empat Koperasi Unit Desa (KUD). Tanaman pada kebun plasma mulai ditanam pada tahun 1996 sehingga saat ini telah memasuki fase penurunan produktivitas. Sejak tahun 2020, perusahaan bersama petani melaksanakan program *replanting* secara bertahap, dan hingga tahun 2025 tercatat sekitar 210 hektare kebun plasma telah diremajakan. Pemerintah melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) turut memberikan bantuan pembiayaan kepada petani yang memenuhi persyaratan, namun bantuan tersebut hanya meringankan sebagian biaya sehingga pelaksanaan *replanting* tetap menjadi tanggung jawab bersama antara perusahaan dan masyarakat.

Dalam menjalankan kemitraan tersebut, perusahaan menerapkan prinsip *Good Agricultural Practices* (GAP), efisiensi kerja, dan pengelolaan lingkungan berkelanjutan yang didukung struktur organisasi mulai dari pimpinan perusahaan, bagian teknik, bagian operasional kebun, hingga tenaga pelaksana lapangan yang membina petani secara langsung. Keberadaan empat KUD sebagai simpul kelembagaan di tingkat desa menjadikan struktur kemitraan ini berlapis: perusahaan tidak berhubungan langsung dengan seluruh petani secara individual, melainkan melalui koperasi yang berperan mengoordinasikan pendataan, penyaluran informasi, dan penyelesaian administrasi. Struktur berlapis semacam ini lazim ditemukan pada skema inti-plasma perkebunan kelapa sawit di Indonesia, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan koperasi dan kualitas komunikasi yang dibangun bersama perusahaan inti.

Kondisi keterbatasan modal serta hilangnya sumber pendapatan selama masa tanaman belum menghasilkan (TBM) memunculkan perbedaan pandangan di kalangan petani plasma terhadap program *replanting*. Sebagian petani mendukung karena berharap produktivitas dan pendapatan meningkat pada masa mendatang, sedangkan sebagian lain merasa keberatan karena harus kehilangan sumber penghasilan dalam jangka pendek. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan *replanting* tidak semata ditentukan oleh aspek teknis budidaya, melainkan juga oleh kualitas pola kemitraan yang dibangun antara perusahaan dan masyarakat, khususnya menyangkut kejelasan hak, kewajiban, dan mekanisme penyelesaian kendala di lapangan. Persoalan ini tidak unik pada satu perusahaan, mengingat skema inti-plasma dengan karakteristik serupa -- tanaman yang menua bersamaan dan keterbatasan modal petani -- juga dihadapi oleh banyak perusahaan perkebunan kelapa sawit lain di Indonesia yang kini memasuki siklus peremajaan generasi pertama, sehingga kajian mendalam terhadap satu kasus dapat memberikan pembelajaran yang relevan secara lebih luas.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji tema kemitraan dan *replanting* kelapa sawit dari sudut pandang yang berbeda-beda. Alamanda (2025) menyoroti pentingnya perjanjian kemitraan tertulis sebagai dasar kepastian hukum dalam peremajaan kelapa sawit, namun kajiannya lebih menitikberatkan pada aspek legal-formal dan belum menelusuri bagaimana perjanjian tersebut diimplementasikan di lapangan. Jajasmara (2025) mengkaji kemitraan plasma dalam konteks peningkatan kesejahteraan ekonomi desa secara umum, bukan pada konteks program *replanting* secara khusus. Asidiq et al. (2022) berfokus pada faktor-faktor yang memengaruhi tingkat partisipasi petani dalam *replanting*, sedangkan Suparjan dan Lathifah (2020) menggunakan pendekatan *Analytical Network Process* untuk mengukur preferensi petani terhadap model kemitraan, tanpa mendeskripsikan realitas pelaksanaannya. Amalia et al. (2017) mengkaji kesiapan petani dan koperasi dalam program *replanting*, namun tidak menyentuh pola relasi kemitraan antara perusahaan dan petani

secara menyeluruh. Dengan demikian, masih terdapat celah penelitian (*research gap*) berupa minimnya kajian yang secara khusus mendeskripsikan implementasi pola kemitraan pada tingkat perusahaan dalam program *replanting*, mulai dari tahap perencanaan hingga penyelesaian program, sekaligus mengaitkannya dengan pemenuhan hak, kewajiban, dan kendala riil di lapangan. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan menempatkan PT. Ciptatani Kumai Sejahtera (Medco Agro) sebagai studi kasus tunggal yang dikaji secara mendalam.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan pola kemitraan antara PT. Ciptatani Kumai Sejahtera (Medco Agro) dengan masyarakat dalam pelaksanaan program *replanting* kelapa sawit mulai dari tahap perencanaan hingga penyelesaian program; (2) mendeskripsikan pelaksanaan hak, kewajiban, serta peran perusahaan dan masyarakat dalam program tersebut; dan (3) mengidentifikasi kendala yang dihadapi perusahaan dan masyarakat beserta upaya penyelesaiannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk menggambarkan secara sistematis pelaksanaan pola kemitraan antara PT. Ciptatani Kumai Sejahtera (Medco Agro) dengan masyarakat dalam program *replanting* kelapa sawit. Penelitian dilaksanakan di Desa Sukamakmur, Kecamatan Seruyan Tengah, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, yang dipilih secara *purposive* karena merupakan lokasi operasional utama perusahaan sekaligus wilayah pelaksanaan program *replanting* melalui pola kemitraan inti-plasma.

Data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara mendalam terhadap 30 petani plasma peserta program *replanting* serta pihak manajemen perusahaan dan pengurus Koperasi Unit Desa (KUD), dan dokumentasi kegiatan di lapangan. Jumlah responden ditentukan berdasarkan pertimbangan kecukupan informasi (*information saturation*) pada konteks studi kasus tunggal, dengan tetap memperhatikan keterwakilan karakteristik petani plasma dari sisi jenis kelamin, kelompok umur, tingkat pendidikan, dan lama berkebun. Data sekunder diperoleh dari dokumen perusahaan, dokumen kerja sama kemitraan, laporan pelaksanaan *replanting*, literatur, buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta dokumen pendukung lainnya.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu: (1) observasi terhadap proses pelaksanaan *replanting* dan aktivitas kemitraan; (2) wawancara mendalam menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya; dan (3) dokumentasi terhadap dokumen kerja sama, laporan biaya, data luas lahan, dan data produksi. Variabel yang diamati meliputi pola kemitraan yang dianalisis berdasarkan tiga prinsip Hafsah (2000) saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan pelaksanaan hak dan kewajiban perusahaan maupun petani, kendala pelaksanaan kemitraan, serta informasi komponen biaya *replanting* yang dideskripsikan sebagai data pendukung tanpa dilakukan analisis perhitungan biaya.

Data dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan model interaktif Miles dan Huberman, yang terdiri atas tiga tahap. Pertama, reduksi data, yaitu memilih, menyederhanakan, dan memfokuskan data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi sesuai tujuan penelitian. Kedua, penyajian data, yaitu menyajikan data yang telah direduksi dalam bentuk uraian naratif, tabel, dan gambar agar mudah dipahami. Ketiga, penarikan kesimpulan, yaitu menarik simpulan berdasarkan hasil analisis mengenai pola kemitraan,

pelaksanaan hak dan kewajiban, serta kendala yang dihadapi selama pelaksanaan program *replanting*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Responden penelitian berjumlah 30 orang petani plasma peserta program *replanting*. Karakteristik responden yang diamati meliputi jenis kelamin, kelompok umur, tingkat pendidikan, dan lama berkebun.

Tabel 1. Karakteristik Responden Petani Plasma

Kelompok Umur	Jumlah	Persentase (%)
30–40 tahun	11	36,67
41–50 tahun	12	40,00
>50 tahun	7	23,33
Total	30	100,00

Sumber: Analisis Data Primer 2021-2025

Berdasarkan Tabel 1, kelompok umur 41–50 tahun merupakan kelompok terbesar, yaitu sebanyak 12 responden atau 40,00%. Selanjutnya, responden berumur 30–40 tahun sebanyak 11 orang atau 36,67%, sedangkan responden berumur lebih dari 50 tahun sebanyak 7 orang atau 23,33%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden berada pada usia produktif dan masih memiliki kemampuan untuk terlibat dalam pengelolaan perkebunan. Kelompok usia tersebut juga relatif memiliki pengalaman yang cukup dalam mengelola kebun kelapa sawit sehingga dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan program *replanting* berdasarkan pengalaman yang dimiliki.

Tabel 2. Karakteristik Responden Petani Plasma

Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
SD	10	33,33
SMP	9	30,00
SMA	11	36,67
Total	30	100,00

Sumber: Analisis Data Primer 2021-2025

Berdasarkan Tabel 2, tingkat pendidikan responden paling banyak adalah SMA sebanyak 11 orang atau 36,67%, kemudian SD sebanyak 10 orang atau 33,33%, dan SMP sebanyak 9 orang atau 30,00%. Tidak terdapat responden dengan tingkat pendidikan perguruan tinggi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan formal petani relatif beragam, tetapi sebagian besar berada pada tingkat pendidikan dasar hingga menengah.

Tabel 3. Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Berkebun

Lama Berkebun	Jumlah	Persentase (%)
<10 tahun	4	13,33
10–20 tahun	17	56,67
>20 tahun	9	30,00
Total	30	100,00

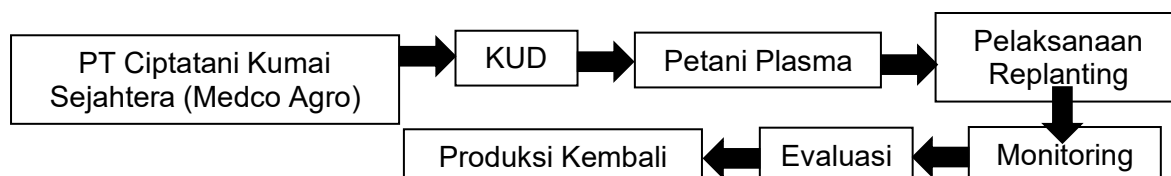
Sumber: Analisis Data Primer 2021-2025

Berdasarkan Tabel 3, sebanyak 17 responden atau 56,67% telah berkebun selama 10–20 tahun. Selanjutnya, 9 responden atau 30,00% telah berkebun lebih dari 20 tahun, sedangkan 4 responden atau 13,33% memiliki pengalaman kurang dari 10 tahun. Data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki pengalaman cukup panjang dalam mengelola perkebunan kelapa sawit. Pengalaman tersebut menjadi modal penting bagi

petani dalam memahami perubahan kondisi kebun, kebutuhan pemeliharaan tanaman, serta proses pelaksanaan replanting.

Bentuk dan Alur Pola Kemitraan

Pola kemitraan antara PT. Ciptatani Kumai Sejahtera (Medco Agro) dengan masyarakat dijalankan melalui skema inti-plasma yang melibatkan tiga aktor utama, yaitu perusahaan, Koperasi Unit Desa (KUD), dan petani plasma. KUD berperan sebagai penghubung yang menjalankan fungsi pendataan, penyampaian informasi, dan fasilitasi administrasi antara perusahaan dan petani. Alur pelaksanaan kemitraan dalam program *replanting* digambarkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Alur Pelaksanaan Pola Kemitraan Program Replanting

Sumber: Diolah dari Data Primer, 2025

Secara operasional, pelaksanaan *replanting* mengikuti tahapan pendataan lahan dan petani peserta, verifikasi administrasi, penandatanganan perjanjian kerja sama, penebangan tanaman tua, *land clearing*, persiapan lahan, penanaman bibit, pemeliharaan tanaman belum menghasilkan (TBM), monitoring, hingga evaluasi. Alur tersebut menunjukkan bahwa kemitraan tidak berhenti pada penyediaan sarana produksi, tetapi berlanjut hingga tahap pengawasan dan evaluasi yang menjadi dasar bagi keberlanjutan produksi kembali. Pola ini konsisten dengan prinsip *mutual need* dalam teori kemitraan Hafshah (2000): perusahaan membutuhkan keterlibatan aktif petani dalam pengelolaan lahan di tingkat tapak, sedangkan petani membutuhkan dukungan sarana produksi, pendampingan teknis, dan akses pembiayaan yang dimiliki perusahaan.

Hak dan Kewajiban Perusahaan

Berdasarkan aturan tertulis, perusahaan memiliki hak berupa melakukan monitoring, evaluasi, memastikan SOP dijalankan, memperoleh laporan perkembangan, dan melakukan pembinaan. Sementara itu, kewajiban perusahaan meliputi penyediaan bibit unggul, pendampingan, tenaga teknis, pembinaan, dan bantuan administrasi PSR.

Tabel 4. Hasil Hak Perusahaan dalam Melakukan Monitoring

Indikator	Ya	Persentase	Tidak	Persentase
Perusahaan melakukan kunjungan lapangan	29	96,67%	1	3,34%
Monitoring dilakukan sesuai jadwal	27	90,00%	3	10,00%
Petugas memantau pertumbuhan bibit	28	93,33%	2	2,67%
Perusahaan memantau pemeliharaan tanaman	27	90,00%	3	10,00%
Hasil monitoring dicatat	26	86,67%	4	14,33%

Sumber: Analisis Data Primer 2021-2025

Berdasarkan Tabel 4, sebagian besar responden menyatakan bahwa perusahaan telah melakukan monitoring terhadap pelaksanaan replanting. Persentase tertinggi terdapat pada kegiatan kunjungan lapangan, yaitu 96,67%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa monitoring

menjadi salah satu kegiatan yang cukup aktif dilakukan perusahaan. Monitoring dilakukan untuk mengetahui kondisi tanaman dan kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan SOP. Namun, indikator pencatatan hasil monitoring memperoleh persentase relatif lebih rendah, yaitu 86,67%. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat sebagian kecil responden yang belum mengetahui atau belum merasakan adanya pencatatan hasil monitoring secara rutin. Secara keseluruhan, hak perusahaan dalam melakukan monitoring telah terlaksana dengan baik.

Tabel 5. Hak Perusahaan dalam Melakukan Evaluasi

Indikator	Ya	Persentase	Tidak	Persentase
Perusahaan melakukan evaluasi setelah monitoring	27	90,00%	3	10,00%
Hasil evaluasi disampaikan kepada petani	25	83,33%	5	17,77%
Perusahaan memberikan rekomendasi perbaikan	26	86,67%	4	14,43%
Perusahaan mengevaluasi pertumbuhan tanaman	25	83,33%	5	17,77%
Evaluasi menjadi dasar tindak lanjut	24	80,00%	6	20,00%

Sumber: Analisis Data Primer 2021-2025

Hasil survey menunjukkan bahwa evaluasi telah dilakukan oleh perusahaan. Sebanyak 90,00% responden menyatakan bahwa perusahaan melakukan evaluasi setelah kegiatan monitoring. Persentase terendah terdapat pada penggunaan hasil evaluasi sebagai dasar tindak lanjut, yaitu 80,00%. Hal tersebut menunjukkan bahwa meskipun evaluasi telah dilakukan, belum seluruh petani mengetahui bagaimana hasil evaluasi digunakan dalam menentukan tindakan selanjutnya. Oleh karena itu, penyampaian hasil evaluasi kepada petani perlu ditingkatkan agar proses evaluasi tidak hanya menjadi kegiatan internal perusahaan tetapi juga menjadi bahan perbaikan bersama.

Tabel 6. Hasil Pengawasan SOP

Indikator	Ya	Persentase	Tidak	Persentase
Perusahaan memastikan kegiatan sesuai SOP	28	93,33%	2	07,77%
Pemeriksaan penerapan SOP dilakukan	27	90,00%	3	10,00%
Teguran diberikan jika terjadi pelanggaran	24	80,00%	6	20,00%
Perusahaan memberikan arahan perbaikan	26	86,67%	4	14,33%
Dilakukan pengecekan ulang	23	76,67%	7	24,33%

Sumber: Analisis Data Primer 2021-2025

Sebagian besar responden menyatakan bahwa perusahaan telah melakukan pengawasan terhadap penerapan SOP. Akan tetapi, indikator pengecekan ulang setelah dilakukan perbaikan memperoleh nilai paling rendah, yaitu 76,67%. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan awal telah berjalan cukup baik, tetapi tindak lanjut setelah ditemukan ketidaksesuaian masih perlu diperkuat. Pengecekan ulang penting dilakukan untuk memastikan bahwa petani telah benar-benar melakukan perbaikan sesuai arahan perusahaan.

Tabel 7. Hasil Laporan Perkembangan

Indikator	Ya	Persentase	Tidak	Persentase
Petani menyampaikan laporan secara berkala	22	73,33%	8	27,67%
Laporan memuat kondisi tanaman	21	70,00%	9	30,00%
Laporan mencakup kendala	20	66,67%	10	34,33%
Laporan disampaikan sesuai jadwal	19	63,33%	11	37,67%
Laporan digunakan untuk tindak lanjut	22	73,33%	8	27,67%

Sumber: Analisis Data Primer 2021-2025

Dibandingkan indikator lainnya, penyampaian laporan perkembangan merupakan salah satu aspek yang masih perlu ditingkatkan. Persentase terendah terdapat pada ketepatan jadwal penyampaian laporan, yaitu 63,33%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa mekanisme komunikasi dan pelaporan antara petani dengan perusahaan masih perlu diperkuat. Laporan perkembangan sebaiknya dibuat secara sederhana dan terjadwal agar petani lebih mudah menyampaikan informasi mengenai kondisi tanaman dan kendala yang terjadi di lapangan.

Tabel 8. Hasil Pembinaan Perusahaan

Indikator	Ya	Persentase	Tidak	Persentase
Perusahaan memberikan pembinaan	27	90,00%	3	10,00%
Pembinaan sesuai kebutuhan petani	26	86,67%	4	13,33%
Pembinaan teknik budidaya	28	93,33%	2	6,67%
Pembinaan dilakukan secara berkala	24	80,00%	6	20,00%
Pembinaan meningkatkan pemahaman	25	83,33%	5	16,67%

Sumber: Analisis Data Primer 2021-2025

Berdasarkan data, pembinaan telah diberikan perusahaan kepada petani. Sebanyak 93,33% responden menyatakan bahwa perusahaan memberikan pembinaan mengenai teknik budidaya dan pemeliharaan tanaman. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya melakukan pengawasan, tetapi juga memberikan arahan kepada petani agar mampu menjalankan kegiatan replanting sesuai ketentuan.

Tabel 9. Hasil Penyediaan Bibit

Indikator	Ya	Persentase	Tidak	Persentase
Perusahaan menyediakan bibit unggul	30	100%	0	0%
Jumlah bibit sesuai luas lahan	29	96,67%	1	3%
Bibit disalurkan sebelum penanaman	30	100%	0	0%
Mutu bibit diperiksa	28	93,33%	2	7%
Terdapat data penyaluran bibit	27	90,00%	3	10%

Sumber: Analisis Data Primer 2021-2025

Penyediaan bibit merupakan salah satu kewajiban perusahaan yang menunjukkan hasil paling baik dalam data. Seluruh responden menyatakan menerima bibit dari perusahaan, dengan kebutuhan bibit sekitar 143 batang/ha dengan jarak tanam 9 × 9 meter pola segitiga sama sisi. Hasil menunjukkan bahwa penyediaan bibit telah menjadi salah satu bentuk dukungan nyata perusahaan kepada petani dalam pelaksanaan replanting.

Tabel 10. Hasil Pendampingan

Indikator	Ya	Persentase	Tidak	persentase
Pendampingan sejak persiapan lahan	28	93,33%	2	6,67%
Pendampingan saat penanaman	27	90,00%	3	10,00%
Pendampingan selama TBM	26	86,67%	4	13,33%
Kunjungan lapangan berkala	25	83,33%	5	16,67%
Solusi terhadap kendala diberikan	24	80,00%	6	20,00%

Sumber: Analisis Data Primer 2021-2025

Pendampingan perusahaan dinilai cukup baik oleh responden. Pendampingan paling banyak dirasakan pada tahap persiapan lahan dan penanaman. Akan tetapi, pemberian solusi terhadap kendala memperoleh persentase 80,00%. Hal tersebut menunjukkan masih terdapat sebagian responden yang merasa bahwa penyelesaian masalah di lapangan belum selalu dilakukan secara cepat. Pendampingan seharusnya terus dilakukan sampai tanaman memasuki masa TBM karena fase tersebut membutuhkan pemeliharaan intensif. Proposal juga menetapkan pendampingan sebagai kewajiban perusahaan selama proses replanting hingga TBM.

HAK dan Kewajiban Petani

Petani memiliki hak memperoleh bibit, pelatihan, pendampingan, informasi, dan transparansi. Dengan kewajiban mematuhi SOP, memelihara tanaman, menjaga kebun, mengikuti pelatihan, dan melengkapi administrasi.

Tabel 11. Hasil Hak Petani Mendapat Bibit

Indikator	Ya	Persentase	Tidak	Persentase
Petani menerima bibit	30	100%	0	0,00%
Bibit bersertifikat	29	96,67%	1	3,33%
Jumlah sesuai luas lahan	28	93,33%	2	6,67%
Bibit diterima sebelum penanaman	29	96,67%	1	3,33%
Bibit layak tanam	28	93,33%	2	6,67%

Sumber: Analisis Data Primer 2021-2025

Data menunjukkan bahwa hak petani dalam memperoleh bibit telah terpenuhi dengan baik. Seluruh responden menyatakan menerima bibit dari perusahaan. Hal tersebut menunjukkan adanya kesesuaian antara kewajiban perusahaan dalam menyediakan bibit dan hak petani sebagai penerima manfaat program.

Tabel 12. Hasil Hak Mendapat Pelatihan

Indikator	Ya	Tidak	Persentase Ya
Mendapat pelatihan sebelum replanting	27	3	90,00%
Pelatihan teknik penanaman	26	4	86,67%
Pelatihan pemupukan dan pemeliharaan	25	5	83,33%
Pelatihan pengendalian OPT	24	6	80,00%
Pelatihan melalui praktik lapangan	24	6	80,00%

Sumber: Analisis Data Primer 2021-2025

Sebagian besar petani menyatakan memperoleh pelatihan. Namun, pelaksanaan praktik lapangan masih memperoleh persentase yang lebih rendah dibandingkan pemberian pelatihan secara umum. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelatihan tidak cukup hanya

diberikan dalam bentuk penyuluhan, tetapi perlu disertai praktik langsung agar petani dapat memahami teknik budidaya dengan lebih mudah.

Tabel 13. Hasil Pendampingan Petani

Indikator	Ya	Tidak	Persentase Ya
Mendapat pendampingan teknis	27	3	90,00%
Tenaga teknis melakukan kunjungan	25	5	83,33%
Mendapat arahan teknik budidaya	26	4	86,67%
Kendala teknis dibantu perusahaan	23	7	76,67%
Pendampingan sampai TBM	22	8	73,33%

Sumber: Analisis Data Primer 2021-2025

Hasil menunjukkan bahwa pendampingan teknis telah dirasakan oleh sebagian besar petani. Namun, intensitas pendampingan hingga masa TBM masih perlu diperkuat. Hal ini penting karena keberhasilan replanting tidak berhenti pada kegiatan penanaman. Petani masih membutuhkan pendampingan dalam pemupukan, penyulaman, pengendalian gulma, serta pengendalian hama dan penyakit selama masa TBM.

Tabel 14. Hasil Hak Mendapat Informasi

Indikator	Ya	Tidak	Persentase Ya
Informasi persyaratan program	28	2	93,33%
Informasi jadwal program	27	3	90,00%
Penjelasan hak dan kewajiban	25	5	83,33%
Informasi perkembangan program	24	6	80,00%
Informasi melalui rapat/sosialisasi	26	4	86,67%

Sumber: Analisis Data Primer 2021-2025

Informasi mengenai persyaratan program merupakan informasi yang paling banyak diterima oleh petani. Namun, penyampaian perkembangan program masih perlu ditingkatkan. Keterbukaan informasi penting karena hubungan kemitraan membutuhkan komunikasi yang baik antara perusahaan dan petani. Informasi mengenai jadwal, hak, kewajiban, serta perkembangan program perlu disampaikan secara berkala.

Tabel 15. Hasil Transparansi Program

Indikator	Ya	Tidak	Persentase Ya
Informasi penggunaan dana PSR	20	10	66,67%
Informasi penyaluran bibit	22	8	73,33%
Informasi pelaksanaan replanting	21	9	70,00%
Informasi perkembangan administrasi	19	11	63,33%
Penjelasan jika terjadi perubahan	18	12	60,00%

Sumber: Analisis Data Primer 2021-2025

Berdasarkan data, transparansi merupakan salah satu aspek yang masih perlu mendapatkan perhatian. Persentase tertinggi hanya mencapai 73,33%, sedangkan indikator penjelasan apabila terdapat perubahan program hanya mencapai 60,00%. Hasil ini menunjukkan bahwa petani secara umum telah memperoleh informasi mengenai kegiatan, tetapi masih terdapat keterbatasan dalam memperoleh informasi yang berkaitan dengan administrasi, penggunaan dana, dan perubahan pelaksanaan program. Dengan demikian, perusahaan perlu meningkatkan keterbukaan informasi agar petani tidak hanya mengetahui kegiatan teknis, tetapi juga memahami aspek administrasi dan pelaksanaan program secara menyeluruh.

Tabel 16. Hasil Kepatuhan Petani terhadap SOP

Indikator	Ya	Tidak	Persentase Ya
Penanaman sesuai SOP	29	1	96,67%
Pemupukan sesuai rekomendasi	28	2	93,33%
Pengendalian gulma sesuai SOP	27	3	90,00%
Pengendalian hama dan penyakit	26	4	86,67%
Seluruh tahapan sesuai SOP	25	5	83,33%

Sumber: Analisis Data Primer 2021-2025

Kepatuhan petani terhadap SOP menunjukkan hasil yang cukup baik. Sebagian besar petani menyatakan telah mengikuti arahan perusahaan dalam melaksanakan kegiatan budidaya. Namun, semakin luas cakupan kegiatan budidaya, persentase kepatuhan cenderung menurun. Hal tersebut menunjukkan bahwa penerapan SOP secara menyeluruh masih memerlukan monitoring dan pembinaan secara berkelanjutan.

Tabel 17. Hasil Pemeliharaan Tanaman

Indikator	Ya	Tidak	Persentase Ya
Pemeliharaan dilakukan rutin	28	2	93,33%
Melakukan penyulaman	27	3	90,00%
Melakukan penyiangan	26	4	86,67%
Mengendalikan hama/penyakit	25	5	83,33%
Pemupukan sesuai jadwal	24	6	80,00%

Sumber: Analisis Data Primer 2021-2025

Sebagian besar petani telah melaksanakan pemeliharaan tanaman secara rutin. Namun, kegiatan pemupukan sesuai jadwal memiliki persentase paling rendah, yaitu 80,00%. Hal tersebut menunjukkan bahwa aspek pemeliharaan tanaman, khususnya pemupukan, masih memerlukan pendampingan. Pemupukan yang tidak sesuai jadwal dapat memengaruhi pertumbuhan tanaman pada fase TBM.

Tabel 18. Hasil Kewajiban Menjaga Kebun

Indikator	Ya	Tidak	Persentase Ya
Menjaga tanaman dari gangguan ternak	29	1	96,67%
Menjaga kebun dari kebakaran	28	2	93,33%
Menjaga kebun dari pencurian	27	3	90,00%
Menjaga kebersihan kebun	26	4	86,67%
Melaporkan kerusakan kebun	25	5	83,33%

Sumber: Analisis Data Primer 2021-2025

Kewajiban menjaga kebun telah dilaksanakan dengan cukup baik. Petani memiliki kesadaran untuk menjaga tanaman dari gangguan yang dapat menghambat pertumbuhan. Namun, pelaporan kerusakan masih perlu ditingkatkan karena tidak semua petani secara langsung melaporkan permasalahan yang terjadi. Komunikasi yang cepat diperlukan agar perusahaan dapat memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut.

Tabel 19. Hasil Keikutsertaan Petani dalam Pelatihan

Indikator	Ya	Tidak	Persentase Ya
Mengikuti pelatihan perusahaan	27	3	90,00%
Mengikuti penyuluhan budidaya	26	4	86,67%
Mengikuti praktik lapangan	25	5	83,33%
Menerapkan materi pelatihan	24	6	80,00%
Mengikuti pelatihan hingga selesai	23	7	76,67%

Sumber: Analisis Data Primer 2021-2025

Keikutsertaan petani dalam pelatihan tergolong baik. Akan tetapi, terdapat penurunan pada indikator penerapan materi dan keikutsertaan sampai selesai. Hal tersebut menunjukkan bahwa kehadiran dalam pelatihan belum selalu berarti seluruh materi diterapkan di kebun. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan monitoring setelah pelatihan untuk memastikan pengetahuan yang diberikan benar-benar diterapkan.

Tabel 20. Hasil Kelengkapan Administrasi Petani

Indikator	Ya	Tidak	Persentase
Melengkapi identitas diri	28	2	93,33%
Melengkapi dokumen lahan	27	3	90,00%
Menandatangani perjanjian kerja sama	26	4	86,67%
Menyerahkan dokumen persyaratan	25	5	83,33%
Melengkapi administrasi sesuai jadwal	24	6	80,00%

Sumber: Analisis Data Primer 2021-2025

Kelengkapan administrasi petani secara umum telah berjalan baik. Namun, ketepatan waktu dalam melengkapi administrasi masih perlu diperhatikan. Pendampingan administrasi menjadi penting karena program replanting melibatkan berbagai dokumen dan persyaratan. Proposal juga menempatkan bantuan administrasi PSR sebagai salah satu kewajiban perusahaan.

Kendala Pelaksanaan Program Replanting

Berdasarkan hasil wawancara terhadap 30 petani, ditemukan beberapa kendala dalam pelaksanaan program replanting.

Tabel 21. Kendala Pelaksanaan Program Replanting

Kendala	Jumlah Responden	Persentase (%)
Pendanaan	17	56,67
Administrasi	13	43,33
Cuaca	11	36,67
Legalitas lahan	9	30,00
Komunikasi	8	26,67
SDM/tenaga kerja	6	20,00
Bibit	5	16,67
Lainnya	2	6,67

Sumber: Analisis Data Primer 2021-2025

Berdasarkan Tabel 21, kendala yang paling banyak disebutkan oleh responden adalah pendanaan, yaitu sebanyak 17 orang atau 56,67%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa

aspek pembiayaan menjadi salah satu permasalahan penting dalam pelaksanaan replanting. Kendala berikutnya adalah administrasi sebesar 43,33%. Administrasi menjadi penting karena peserta program harus memenuhi berbagai persyaratan sebelum dan selama pelaksanaan program.

Kendala cuaca disebutkan oleh 36,67% responden. Kondisi cuaca dapat memengaruhi pelaksanaan kegiatan lapangan, terutama pada kegiatan persiapan lahan, penanaman, dan pemeliharaan. Sementara itu, kendala bibit hanya disebutkan oleh 16,67% responden. Hal ini menunjukkan bahwa dalam data, masalah penyediaan bibit bukan merupakan kendala utama dibandingkan aspek pendanaan dan administrasi.

Upaya Penyelesaian Kendala

Berdasarkan hasil wawancara, upaya penyelesaian dilakukan melalui koordinasi antara perusahaan, KUD, dan petani.

Tabel 22. Upaya Penyelesaian Kendala

Upaya	Keterangan
Pendampingan teknis	Petugas perusahaan memberikan arahan langsung di lapangan
Koordinasi dengan KUD	KUD menjadi penghubung perusahaan dan petani
Perbaikan administrasi	Petani dibantu melengkapi dokumen
Monitoring lapangan	Perusahaan melakukan pengecekan kondisi kebun
Pembinaan	Petani diberikan arahan mengenai SOP dan budidaya
Komunikasi langsung	Kendala disampaikan kepada petugas perusahaan

Sumber: Analisis Data Primer 2021-2025

Berdasarkan data, penyelesaian kendala dilakukan melalui pendekatan koordinatif. Perusahaan tidak hanya memberikan instruksi, tetapi juga melakukan pendampingan dan monitoring di lapangan. KUD memiliki posisi penting sebagai penghubung antara perusahaan dan petani. KUD memang dirancang untuk membantu administrasi, pendataan, penyampaian informasi, koordinasi, serta memfasilitasi komunikasi apabila terdapat kendala. Dengan adanya koordinasi tersebut, kendala yang muncul dapat disampaikan kepada pihak yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya.

Penilaian Petani terhadap Pola Kemitraan

Tabel 23. Penilaian Responden terhadap Pelaksanaan Pola Kemitraan

Penilaian	Jumlah	Persentase (%)
Sangat Baik	5	16,67
Baik	18	60,00
Cukup	7	23,33
Kurang	0	0
Sangat Kurang	0	0
Total	30	100,00

Sumber: Analisis Data Primer 2021-2025

Berdasarkan Tabel 23, sebanyak 18 responden atau 60,00% menilai pola kemitraan berada dalam kategori baik, sedangkan 5 responden atau 16,67% menilai sangat baik. Sebanyak 7 responden atau 23,33% memberikan penilaian cukup. Tidak terdapat responden yang memberikan penilaian kurang maupun sangat kurang. Hasil tersebut menunjukkan bahwa secara umum pola kemitraan antara perusahaan dan petani dalam pelaksanaan program replanting dapat dikategorikan baik.

Penilaian tersebut didukung oleh adanya penyediaan bibit, pendampingan, pembinaan, monitoring, serta keterlibatan petani dalam pelaksanaan kegiatan replanting. Namun

demikian, masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, terutama transparansi, pelaporan perkembangan, dan pendampingan hingga masa TBM.

Analisis Pola Kemitraan Berdasarkan Prinsip Saling Membutuhkan, Saling Memperkuat, dan Saling Menguntungkan

Prinsip saling membutuhkan terlihat dari adanya pembagian peran antara perusahaan dan petani. Perusahaan menyediakan dukungan teknis, bibit, pembinaan, monitoring, dan administrasi, sedangkan petani menyediakan lahan dan melaksanakan kegiatan replanting. Berdasarkan data, prinsip saling membutuhkan telah berjalan dengan baik. Keberhasilan program replanting tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja karena perusahaan membutuhkan keterlibatan petani dalam pengelolaan kebun, sedangkan petani membutuhkan dukungan perusahaan dalam melaksanakan replanting.

Prinsip saling memperkuat terlihat melalui pendampingan, pelatihan, pembinaan, monitoring, dan keterlibatan petani dalam kegiatan lapangan. Perusahaan memberikan pengetahuan dan dukungan teknis, sementara petani menerapkan pengetahuan tersebut dalam pengelolaan kebun. Berdasarkan data, prinsip saling memperkuat telah terlihat melalui kegiatan pembinaan dan pendampingan. Petani tidak hanya menjadi penerima bantuan, tetapi juga dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan. Hal tersebut sesuai dengan konsep pemberdayaan masyarakat yang digunakan, yaitu meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan kemandirian masyarakat.

Manfaat program replanting bagi petani terutama berupa tersedianya bibit, pendampingan, pelatihan, dan dukungan teknis. Bagi perusahaan, keberhasilan replanting diharapkan dapat menjaga keberlanjutan kebun plasma dan meningkatkan produktivitas pada masa mendatang. Berdasarkan hasil, pola kemitraan dapat dikatakan mengarah pada hubungan yang saling menguntungkan. Petani memperoleh dukungan untuk melakukan peremajaan kebun, sedangkan perusahaan memperoleh manfaat berupa keberlanjutan pengelolaan kebun plasma dan hubungan kemitraan yang lebih kuat. Dengan demikian, ketiga prinsip kemitraan yaitu saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan telah terlihat dalam pelaksanaan program.

Informasi Biaya Program Replanting

Sesuai dengan metode penelitian, informasi biaya dalam penelitian ini tidak dianalisis melalui perhitungan biaya, tetapi hanya dideskripsikan berdasarkan informasi dari wawancara dan dokumen perusahaan. Proposal secara eksplisit menyebutkan bahwa komponen biaya replanting digunakan sebagai informasi pendukung tanpa analisis perhitungan biaya.

Tabel 24. Komponen Biaya Program Replanting

Komponen Kegiatan	Bentuk Biaya
Penebangan tanaman tua	Biaya tenaga kerja dan alat
Land clearing	Biaya alat dan tenaga kerja
Persiapan lahan	Biaya tenaga kerja dan sarana
Penyediaan bibit	Bibit kelapa sawit unggul
Penanaman	Tenaga kerja dan sarana penanaman
Pemupukan	Pupuk dan tenaga kerja
Pemeliharaan TBM	Tenaga kerja dan sarana pemeliharaan
Monitoring	Kegiatan pengawasan
Pendampingan	Tenaga teknis perusahaan
Administrasi	Dokumen dan kegiatan administrasi

Sumber: Analisis Data Primer 2021-2025

Berdasarkan hasil, pelaksanaan replanting membutuhkan berbagai komponen biaya mulai dari penebangan tanaman tua hingga pemeliharaan TBM. Biaya tersebut tidak hanya berkaitan dengan kegiatan fisik di lapangan, tetapi juga mencakup pendampingan, monitoring, dan administrasi. Komponen biaya tersebut menunjukkan bahwa program replanting merupakan kegiatan yang membutuhkan koordinasi dan dukungan dari berbagai pihak. Dalam penelitian ini, komponen biaya digunakan sebagai informasi pendukung untuk memberikan gambaran mengenai kegiatan yang dilakukan selama program.

Pembahasan Umum

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa pola kemitraan PT. Ciptatani Kumai Sejahtera (Medco Agro) dengan masyarakat dalam program *replanting* telah memenuhi ketiga prinsip kemitraan menurut Hafsah (2000), dengan capaian kuat pada dimensi penyediaan sarana produksi dan pengawasan teknis, tetapi masih memiliki ruang perbaikan pada dimensi komunikasi dan keterbukaan informasi. Kontribusi utama penelitian ini terletak pada penyediaan gambaran empiris tingkat perusahaan yang mengintegrasikan tiga aspek sekaligus -- alur pelaksanaan program, pemenuhan hak dan kewajiban secara terukur, serta kendala dan strategi penyelesaiannya -- yang belum secara bersamaan dibahas dalam penelitian-penelitian terdahulu yang cenderung berfokus pada satu aspek saja, baik itu aspek legal (Alamanda, 2025), aspek kesejahteraan ekonomi (Jajasmara, 2025), maupun aspek determinan partisipasi (Asidiq et al., 2022).

Insight penting yang diperoleh adalah bahwa kekuatan kemitraan tidak dapat diukur hanya dari terpenuhinya kewajiban material seperti bibit dan sarana produksi, tetapi juga harus mempertimbangkan kualitas relasi non-material berupa keterbukaan informasi dan pelaporan berkala. Kesenjangan antara indikator material (di atas 90%) dan indikator komunikasi (di bawah 70%) pada penelitian ini menjadi temuan yang relevan secara praktis bagi perusahaan perkebunan lain yang menjalankan skema inti-plasma serupa, sekaligus memberikan dasar empiris bagi pengembangan indikator evaluasi kemitraan yang lebih komprehensif pada penelitian mendatang.

Secara praktis, temuan ini mengimplikasikan perlunya perusahaan membangun mekanisme pelaporan berkala yang terjadwal dan mudah diakses petani, misalnya melalui laporan tertulis sederhana per periode monitoring atau pertemuan rutin antara petugas lapangan, pengurus KUD, dan perwakilan petani untuk membahas perkembangan serta penggunaan dana PSR. Penguatan kapasitas KUD sebagai simpul informasi juga penting agar fungsi penghubung tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi kanal komunikasi dua arah yang efektif. Bagi penelitian selanjutnya, perbandingan pola kemitraan pada beberapa perusahaan dengan skema inti-plasma yang berbeda dapat memperkuat generalisasi temuan mengenai kesenjangan antara pemenuhan kewajiban material dan kualitas komunikasi dalam program *replanting* kelapa sawit.

KESIMPULAN

Pola kemitraan antara perusahaan dan masyarakat dalam pelaksanaan program replanting: Pola kemitraan antara PT. Ciptatani Kumai Sejahtera (Medco Agro) dengan masyarakat dalam pelaksanaan program replanting dilaksanakan melalui hubungan kerja sama antara perusahaan, Koperasi Unit Desa (KUD), dan petani plasma. Pelaksanaan replanting dilakukan secara bertahap mulai dari pendataan peserta, verifikasi administrasi dan lahan, perjanjian kerja sama, penebangan tanaman tua, land clearing, persiapan lahan, penyediaan dan penanaman bibit, pemeliharaan tanaman belum menghasilkan (TBM), monitoring, hingga evaluasi. Tahapan tersebut dilaksanakan melalui koordinasi antara

perusahaan, KUD, petani, dan pihak terkait. Pola kemitraan yang diterapkan menunjukkan adanya prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Perusahaan membutuhkan keterlibatan petani dalam pengelolaan kebun plasma, sedangkan petani membutuhkan dukungan perusahaan dalam bentuk bibit, pendampingan, pembinaan, informasi, monitoring, dan bantuan administrasi. Dengan demikian, hubungan kemitraan tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan replanting, tetapi juga diarahkan untuk menjaga keberlanjutan kebun plasma dan hubungan kerja sama antara perusahaan dengan masyarakat.

Pelaksanaan hak, kewajiban, dan peran perusahaan serta masyarakat: Antara perusahaan dengan petani secara umum telah berjalan dengan baik. Perusahaan melaksanakan kewajibannya melalui penyediaan bibit unggul, pendampingan teknis, pembinaan, monitoring, evaluasi, serta bantuan dalam proses administrasi program replanting. Petani memperoleh hak berupa bibit, pelatihan, pendampingan, informasi mengenai program, serta transparansi terkait pelaksanaan kegiatan. Sementara itu, petani melaksanakan kewajibannya melalui penerapan SOP, pemeliharaan tanaman, menjaga kebun, mengikuti pelatihan, dan melengkapi administrasi yang diperlukan. Berdasarkan data aspek penyediaan bibit dan monitoring merupakan bagian yang paling baik dirasakan oleh petani. Namun, masih terdapat aspek yang perlu ditingkatkan, khususnya dalam penyampaian laporan perkembangan, transparansi informasi, serta pendampingan secara berkelanjutan sampai masa TBM.

Kendala dan upaya penyelesaian dalam pelaksanaan program replanting: Kendala yang ditemukan dalam data meliputi pendanaan, administrasi, kondisi cuaca, legalitas lahan, komunikasi, tenaga kerja, dan penyediaan bibit. Kendala yang paling banyak dirasakan oleh responden adalah pendanaan dan administrasi. Upaya penyelesaian dilakukan melalui koordinasi antara perusahaan, KUD, dan petani. Perusahaan memberikan pendampingan teknis, melakukan monitoring lapangan, memberikan pembinaan, membantu penyelesaian administrasi, serta membuka komunikasi dengan petani apabila terdapat permasalahan. Dengan demikian, kendala dalam pelaksanaan replanting dapat diminimalkan melalui komunikasi dan koordinasi yang lebih intensif antara perusahaan, KUD, dan petani.

Kondisi umum pola kemitraan: Secara keseluruhan, berdasarkan data, pola kemitraan PT. Ciptatani Kumai Sejahtera (Medco Agro) dengan masyarakat dalam program replanting dapat dikategorikan baik. Hal tersebut ditunjukkan oleh terlaksananya sebagian besar hak dan kewajiban kedua pihak serta adanya koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan replanting. Namun, pola kemitraan masih perlu diperkuat terutama pada aspek keterbukaan informasi, pelaporan, komunikasi, dan pendampingan jangka panjang. Perbaikan pada aspek tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan petani dan mendukung keberhasilan program replanting secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamanda, R. (2025). Perjanjian pola kemitraan dalam pelaksanaan peremajaan tanaman kelapa sawit. *Jurnal Hukum Agraria dan Pertanahan*.
- Amalia, R., Nurkhoiry, R., Nasution, Z. P. S., & Kurniawan, A. (2017). Smallholders' and cooperatives' readiness analysis in oil palm smallholders' plantation replanting program (case study of farmers in Ophir, West Pasaman Regency, West Sumatra Province). *Jurnal Penelitian Kelapa Sawit*, 25(3), 171-182. <https://doi.org/10.22302/iopri.jur.jpks.v25i3.34>
- Ardiansyah, H., Setiawati, R., & Madnasir. (2024). Analisis pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *SYARIKAT: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 7(2), 461-468. [https://doi.org/10.25299/syariat.2024.vol7\(2\).17046](https://doi.org/10.25299/syariat.2024.vol7(2).17046)

- Asidiq, F. H., Yumiati, Y., & Nurmalia, A. (2022). Partisipasi petani dalam pelaksanaan program peremajaan kelapa sawit rakyat di Desa Pagar Dewa, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah. *Jurnal Agribis*, 15(2), 2003-2008. <https://doi.org/10.36085/agribis.v15i2.3563>
- Dewantoro, S., Sharon, G., & Supriatna, S. (2021). Pengaturan hubungan kemitraan antara aplikator dan mitra pengemudi dalam usaha transportasi online di Indonesia. *Justitia Jurnal Hukum*, 5(1). <https://doi.org/10.30651/justitia.v6i1.7648>
- Elkington, J. (1997). *Cannibals with forks: The triple bottom line of 21st century business*. Capstone Publishing.
- Feni, R., & Marwan, E. (2023). Perkembangan luas areal dan produksi sawit serta pengaruhnya terhadap PDRB sub sektor perkebunan Provinsi Bengkulu. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 19(2), 139-152. <https://doi.org/10.20956/jsep.v19i2.21718>
- Freeman, R. E. (1984). *Strategic management: A stakeholder approach*. Pitman Publishing.
- Hafsah, M. J. (2000). *Kemitraan usaha: Konsepsi dan strategi*. Pustaka Sinar Harapan.
- Jajasmara, N. G. (2025). Implementasi program kemitraan plasma kelapa sawit dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi desa: Studi di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah. *JPDS*, 6(1), 79-93. <https://doi.org/10.33822/jpds.v6i1>
- Muflihani, A. R., Yuliarso, M. Z., Mulyasari, G., & Sulistyowati, E. (2025). Model kelembagaan agribisnis (model rantai nilai) pada tanaman kelapa sawit rakyat. *Jurnal Agricultural Review*, 4(1), 27-35. <https://ejurnal.unisan.ac.id/index.php/arview/article/view/1111>
- Nurjannah, F. (2023). Strategi kemitraan sebagai upaya pemberdayaan ekonomi dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat (Studi kasus pada usaha Koperasi Ternak Tani Syari'ah Mitra Subur Kabupaten Bondowoso). *ESA: Jurnal Kajian Keilmuan Ekonomi Syariah*, 5(1), 15-32. <https://doi.org/10.58293/esa.v5i1.60>
- Ridha, A. E., Bahri, M. I., Dermawan, A. A., Irawan, H. T., Irawan, R., Akmal, A. K., & Pamungkas, I. (2022). Pengukuran kesenjangan produktivitas kelapa sawit (*Elaeis guineensis* Jacq) pada kelas kesesuaian lahan S2 di Divisi II Kebun Matapao PT. Socfindo. *Jurnal Optimalisasi*, 8(2), 187-194.
- Suparjan, & Lathifah, A. N. Y. (2020). Analisis preferensi petani terhadap model kemitraan kelapa sawit dengan metode ANP (Analytic Network Process). *Jurnal Teknologi Industri Pertanian*, 30(3), 271-280. <https://doi.org/10.24961/j.tek.ind.pert.2020.30.3.27>